

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilu Bupati atau Walikota yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia di Kabupaten/Kota se-Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 yang berbunyi ‘‘Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara Demokratis’’.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat.

Rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi kedaulatan rakyat perlu mengerti dan memahami segala aspek tentang penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kelompok yang memiliki peran strategis adalah Pemilih Pemula. Posisi pemilih pemula sebagai salah satu dari kelompok sasaran pendidikan pemilih, perlu diberi

prioritas untuk dibentuk menjadi pemilih yang rasional, kritis dan mandiri, sehingga dapat mewujudkan hasil penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Definisi partisipasi politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya (Budiardjo dalam Iskandar, 2010:314).

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum diharapkan dapat mencapai hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini akan dipergunakan sebagai dasar untuk pembentukan pemerintahan dalam lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Pemilu harus dilaksanakan di atas prinsip yang bebas dan adil sebagai fungsi Pemilu yang tidak dipisah-pisahkan antara lain sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan politik, pergantian atau sirkulasi elit penguasa dan sarana pendidikan politik (Haris dalam Tricahyo, 2009:6).

Rusadi Kartaprawira (1988:54) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya."

Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami

perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 02/Kpts/KPU/-Kab-011.329062/Tahun 2013 tentang pedoman teknis Pelaksanaan sosialisasi / Pendidikan Pemilih penyelenggaraan Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013. Pemilih Bupati Garut Tahun 2013 akan berkualitas apabila pemilih mendapatkan informasi yang cukup sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang aktif dan kritis . Untuk itu program yang dibuat dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Bupati Garut Tahun 2013 mempertimbangkan kesesuaian antara materi, metode, dan sasaran sehingga sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Garut mudah diterima oleh pemilih.

Tabel 1.1

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kabupaten Garut 2013

No	Kegiatan	Metode	Media
1	Sosialisasi hari pemungutan suara	Reklame	Bander Stiker
2	Sosialisasi tahapan, program, dan jadwal waktu pemilihan	Penguatan jaringan	Baligo Poster Media
3	Sosialisasi pendaftaran pemilih	Pusat Informasi	\media massa Website
4	Sosialisasi pasangan calon	Pelatihan	media massa billboard poster

5	Launching tahapan, program, dan jadwal	Pusat informasi Pelatihan	Media
6	Launching pasangan calon	Reklame Iklan Kampanye	Spanduk
7	Pemutaran lagu mars pemilihan bupati garut 2013	Media	Media radio
8	Pembuatan maskot pemilihan bupati garut 2013	Design	Pamphlet, stiker , baligo
9	Sosialisasi oleh masyarakat sipil	Pelatihan, Seminar oleh Organisasi, perguruan tinggi dll	Ppk/pps
10	Sosialisasi kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pelatihan Training	Lembaga penyandang cacat

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab.Garut

Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut pada tahun 2008 di laksanakan 2 (dua) putaran, untuk putaran Daftar Pemilih Tetap 1.581.504 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Empat). Sementara jumlah suara sah sebanyak 1.006.664, dan jumlah suara tidak sah 42.493. jumlah partisipasi pemilih 1.040.007 yang dapat dipresentasikan menjadi 66,3% pengguna hak pilih . kemudian untuk putaran kedua Daftar Pemilih Tetap 1.583.659. Sementara suara sah sebanyak 958.552, dan jumlah suara tidak sah 27.346. Jumlah Partisipasi 985.898 yang dapat dipresentasikan 62,3% Pengguna hak pilih.

Untuk Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut pada tahun 2013 di laksanakan 2 (dua) putaran juga, untuk putaran pertama data pemilih tetap 1.760.130. sementara jumlah suara sah sebanyak 1.106.327, dan jumlah suara tidak sah 39.660 , partisipasi pemilih 1.145.987 jika dipresentasikan 65.11%. kemudian untuk putaran kedua data pemilih tetap 1.760.130. sementara jumlah suara sah sebanyak 1.041.933, dan jumlah suara tidak sah 29.590. partisipasi pemilih 1.071,523 yang jika dipresentasikan 60.88%

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih dan Yang Menggunakan Hak Pilih
Pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Garut 2008-2013

Pemilu/putaran	Jumlah Pemilih	Yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase
2008 / pertama	1.581.504	1.040.007	66,3%
2008/ kedua	1.583.659	985.898	62,3%
2013/pertama	1.760.130	1.145.987	65.11%
2013/kedua	1.760.130	1.071,523	60.88%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab.Garut

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sbb:

1. Masih rendahnya pendidikan politik dimasyarakat
2. Masih kurangnya pemahaman pemilih terhadap makna dari demokrasi
3. Banyak masyarakat yang terkesan tidak peduli terhadap pemilukada
4. Kurangnya Kinerja KPU dalam sosialisasi dan pendidikan politik

Selanjutnya, untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah dan penulis mencoba meramu dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **“Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Garut ”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dijabarkan dalam beberapa sub-sub pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana realitas pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana realitas Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Garut ?
3. Seberapa besar pengaruh Pendidikan Politik terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Garut?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realitas pendidikan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui realitas Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui realitas Seberapa besar pengaruh Pendidikan Politik terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Garut

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai dua kegunaan berikut ini.

1. Secara teoritis yaitu untuk mendukung upaya pengembangan Bidang ilmu administrasi negara terutama berkenaan dengan kajian hubungan antara bidang studi administrasi negara dan kebijakan publik, '*public policy*', serta sebagai masukan penelitian sejenis lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Secara praktis yaitu dapat dijadikan bahan masukan bagi unsur peserta pemilu, penyelenggara Pemilu serta unsur-unsur terkait lainnya baik pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Garut, LSM sampai kepada masyarakat di Kabupaten Garut dalam menjalankan pendidikan politik dan partisipasi politik pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Garut secara efektif dan lebih efisien lagi pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Secara universal, Pemilu itu merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Menurut Soedarsono, Pemilu adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, memilih wakil daerah, serta memilih presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, dalam perkembangan negara modern Pemilu menjadi tonggak demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan di atas prinsip yang bebas dan adil (Tricahyo, 2009:6).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fokus penelitian yang akan dilakukan berhubungan erat dengan konsep administrasi negara, dimana dinamika administrasi negara tidak lepas dari persoalan kepentingan masyarakat, '*public*

interest yang mempunyai ciri-ciri pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih *urgen*, karena menyangkut kepentingan semua masyarakat. Pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legalitas dari administrasi negara tersebut. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar tetapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum. Usaha-usaha yang dilakukan sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani (Thoha dalam Iskandar, 2005d:23-24).

Gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di masyarakat harus ditangkap dan diakumulasikan serta diformulasikan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan dimana kegiatan-kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya adalah administrasi negara. Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi juga tidak lepas dari lokus administrasi negara guna mewujudkan kualitas penyelenggaraan baik dari segi manajemen maupun aplikasinya. Dilihat dari sudut ilmu, menurut Dimock dan Dimock dalam (Iskandar, 2005d:17) “administrasi negara” itu merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas yaitu “suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan”. Administrasi negara merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Ahli lain, yaitu Waldo (1992:17) mendefinisikan “administrasi negara” sebagai “suatu

organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Konsep paling baik untuk menjelaskan istilah “administrasi negara” sebagai konsep administrasi negara sebagai suatu proses seperti yang dikemukakan oleh Dimock dalam (Iskandar, 2005d:20) *“a process it is all the steps taken between the time an enforcement agency assumes jurisdiction and the last brick is placed”* (sebagai suatu proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat suatu badan pelaksanaan menerima kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan).

Selanjutnya, penjelasan mengenai variabel tersebut di atas dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang internasional, di sengaja dan sistematis untuk membentuk inividu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

R. Hayer menyebut : pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipasi yang bertanggung jawab dalam politik.

Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada"

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang - dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan

yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Dimensi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996) adalah sebagai berikut :

1. Dimensi pertama adalah “pendidikan politik”

Pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial , dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara..

2. Dimensi Kedua adalah “Pembentukan Hati Nurani Politik”

Pembentukan hati nurani politik ini yang didalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab ethis terhadap sesama warga negara.

3. Dimensi Ketiga adalah “skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik”

Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya.

4. Dimensi Keempat adalah “perbaikan dan peningkatan Jaringan politik dan kemasyarakatan”

Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan.

5. Dimensi Kelima adalah “Konflik-konflik aktual”

pendidikan politik banyak membahas *konflik-konflik aktual*. Dan lewat pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisis konflik bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri; bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari “atas”.

Dengan demikian orang akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintahan. Juga ikut mengontrol gerak pembangunan, tanpa perlu terjadi konflik-konflik yang membahayakan.

2. Partisipasi Politik Pemilih

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams (2004:83), partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Sedangkan partisipasi politik menurut Budiardjo dalam Iskandar (2010:314) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*publik policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, '*contacting*' dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

Definisi inti partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam Iskandar (2010:315) menggarisbawahi bahwa partisipasi adalah kegiatan warga negara preman, '*private citizen*' yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Davis terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, yaitu: (1) Adanya

penyertaan pikiran dan perasaan, (2) adanya motivasi untuk berkontribusi, serta (3) adanya tanggung jawab bersama.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Sulaiman yang dikutip oleh Sastropetro (1998:41), merumuskan bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

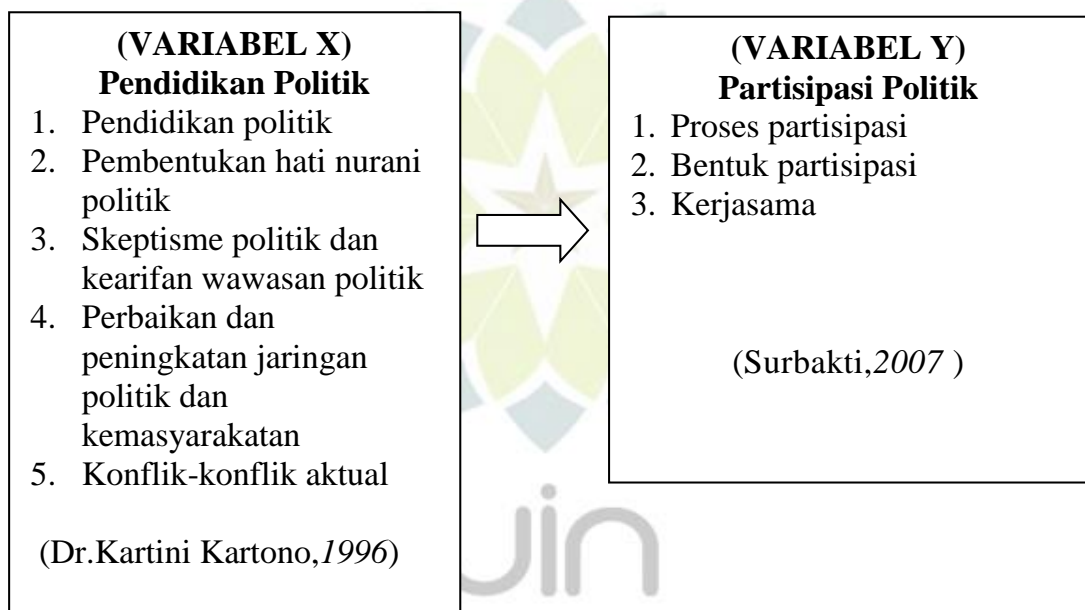
Masih menurut Sulaiman yang dikutip Sastropetro (1998:43) Jenis-jenis partisipasi politik adalah: (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, '*physical participation*', (3) partisipasi pikiran dan tenaga, '*psychological and physical participation*'; (4) partisipasi keahlian, '*participation with skill*', (5) partisipasi barang, '*material participation*', dan (6) partisipasi uang/dana, '*money participation*'.

Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum. Penempatan pemilih sebagai subjek pemilihan umum mutlak diperlukan sehingga pemilih turut berperan aktif menudukung dalam perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peran mereka masing-masing. Senada dengan itu Abdullah (2009:263) dalam Pemilu diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, penghitungan cepat hasil Pemilu, '*quick count*', dengan ketentuan: (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu; (2) Tidak mengganggu

proses penyelenggaraan Pemilu; (3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (4) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Model kerangka pemikiran Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Garut

Gambar 1.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011: 64)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditemukan diatas maka hipotesis penelitian sebagai berikut : “Terdapat pengaruh yang signifikan antara

pendidikan politik terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah:

H_0 : $p = 0$, Bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pendidikan politik terhadap peningkatan partisipasi politik pemilihan kepala daerah

H_a : $p \neq 0$ Bahwa pendidikan politik memberi pengaruh yang besar terhadap peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

H_0 : Bahwa pendidikan politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik

H_1 : Bahwa pendidikan politik berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik

